

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini isu terrorisme menjadi sangat populer diperbincangkan, terutama pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika yang sangat mengejutkan publik Amerika dan juga menggemparkan dunia. Peristiwa tersebut berawal dari dibajaknya empat pesawat oleh terroris. Keempat pesawat tersebut masing-masing: Penerbangan *American Airlines 11*, yang menabrak menara *World Trade Center* utara, penerbangan *United Airlines 175*, yang menabrak menara *World Trade Center* selatan, penerbangan *American Airlines 77*, yang menabrak *The Pentagon*, penerbangan *United Airlines 93*, yang menabrak ke tanah. Semua penumpang dari keempat pesawat tersebut tewas, termasuk seluruh awak dan terrorisnya. Ribuan jiwa di *World Trade Center* dan *The Pentagon* juga tewas. Inilah serangan terbesar oleh orang non-Amerika pada AS sejak 1814.

Selain di Amerika, rangkaian peristiwa terror juga terjadi di Indonesia. Dimana terjadi tiga peristiwa pemboman yang tidak hanya menggemparkan masyarakat Indonesia tetapi juga menjadi perhatian publik internasional, kerana terjadi 1 tahun setelah peristiwa 11 September dan juga memakan korban yang sebagian besar warga negara asing. Rangkaian peristiwa tersebut yaitu: pemboman di Bali 1, 2 dan peristiwa pemboman JW Marriot

Bom Bali 1 terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 di kota kecamatan Kuta di pulau Bali, Indonesia, mengorbankan 202 orang dan mencederakan 209 yang lain, kebanyakan merupakan wisatawan asing. Peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Beberapa orang Indonesia telah dijatuhi hukuman mati karena peranan mereka dalam pengeboman tersebut. Abu Bakar Baasyir, yang diduga sebagai salah satu yang terlibat dalam memimpin pengeboman ini, dinyatakan tidak bersalah pada Maret 2005 atas konspirasi serangan bom ini, dan hanya divonis atas pelanggaran keimigrasian.¹

Selain itu, terjadinya Pengeboman Jakarta 2003 (disebut juga Pengeboman JW Marriott 2003), adalah peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia pada pukul 12.45 dan 12.55 WIB Selasa, 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup selama tiga minggu dan setelah melakukan operasi perlengkapan mulai reopened menyelesaikan renovasi kembali tanggal Jumat, 22 Agustus 2003.²

Pengeboman Bali 2 pada tahun 2005 adalah sebuah seri pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka.

¹ "Bom Bali 2002", http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002, diakses tanggal 08 Oktober 2010.

² "Pengeboman JW Marriot 2003" http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_JW_Marriott_2003 diakses

Pada acara konferensi pers, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan telah mendapat peringatan mulai bulan Juli 2005 akan adanya serangan terorisme di Indonesia. Namun aparat mungkin menjadi lalai karena pengawasan adanya kenaikan harga BBM, sehingga menjadi peka.³

Sejak serangan teroris ke gedung ikon ekonomi Amerika Serikat yang terletak di jantung kota New York, World Trade Center dan kantor pusat pertahanan AS Pentagon di Washington D.C. pada 11 September 2001 dan pengeboman di berbagai tempat di Indonesia, wacana dalam sistem internasional berubah sama sekali.

Ancaman teroris yang sebelumnya tidak begitu populer, tiba-tiba saja menjadi agenda utama dalam penerapan berbagai kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih, rangkaian peristiwa terror tersebut melibatkan penganut agama Islam sebagai pelakunya, sehingga tidak sedikit masyarakat internasional yang beranggapan bahwa agama Islam adalah agama teorris. Bahkan mantan Presiden AS George W. Bush dalam kepemimpinannya dikenal sangat arogan dalam memandang Islam dan selalu mengkaitkan Islam dengan terorisme.

Sebagian umat muslim di beberapa negara maju, antara lain di AS, mendapat perlakuan yang tidak baik dikarenakan rangkaian peristiwa terror tersebut. Begitu juga di Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Islam, ikut menjadi korban atas anggapan tersebut. Terlebih lagi dengan terjadinya beberapa aksi bom bunuh diri di beberapa tempat di

³ "Bom Bali 2005". http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005. diakses tanggal 08 Oktober

Indonesia, yang tentunya juga melibatkan kaum muslim sebagai pelakunya, membuat Indonesia dianggap sebagai sarang terroris dan juga menjadi sasaran *travel warning* yang diberlakukan oleh beberapa negara di dunia.

Salah satu negara yang pertama kali memberlakukan *Travel warning* adalah negara Australia. Banyaknya korban yang merupakan warga negara Australia pada tragedi Bom Bali 2002, membuat pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab dan menemukan pelaku pemboman tersebut. Kebijakan yang langsung diambil pemerintah Australia sesaat setelah terjadinya pemboman tersebut adalah dengan mengeluarkan *travel warning* kepada warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia. Sehingga hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia semakin memburuk.

Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian dalam negeri ikut menerima dampaknya. Hal ini cukup jelas terlihat dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, dan juga banyaknya pelarian modal yang keluar Indonesia yang disebabkan karena kekhawatiran dari kalangan pengusaha akan adanya insiden serupa di tempat-tempat lain di Indonesia.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk lagi, pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan pasca tragedi terrorisme tersebut di atas. Salah satu langkah strategis tersebut adalah dengan cara melakukan diplomasi dalam hal ini adalah diplomasi

Diplomasi publik secara singkat dapat dijelaskan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui hubungan diplomasi yang dikembangkan melalui baik melalui mekanisme *government to government relations* maupun *government to people* atau bahkan *people to people relations* dengan tujuan agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan nasionalnya masing-masing.

Akan tetapi, realitas diplomasi juga dihadapkan pada tantangan dari media massa. Media massa dapat berperan penting dalam mendekatkan jarak dan meningkatkan pemahaman lintas budaya dan agama. Sebaliknya, media massa juga dapat menjadi pemicu konflik dengan memperbesar jarak di dalam masyarakat. Salah satu contoh potensi konflik lintas budaya dan agama yang diperluas oleh media massa adalah pemuatan kartun Nabi Muhammad di media massa Denmark yang kemudian diikuti oleh media-media massa lainnya di Eropa.

Direktorat Diplomasi Publik RI kemudian menerbitkan sebuah buku saku *online* di situs resmi Departemen Luar Negeri RI yang melaporkan kegiatan-kegiatan Direktorat selama periode 2004-2006. Pada buku saku tersebut, terlihat bahwa Direktorat banyak menyelenggarakan kegiatan yang cukup menarik untuk diulas, salah satunya adalah *interfaith dialogues* yang dilaksanakan di beberapa tempat.⁴

⁴ Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas Diplomasi Publik*, http://www.denlu.go.id/?category_id=127.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapat suatu rumusan masalah yaitu: *Apa kepentingan Indonesia memilih Interfaith Dialogue dalam Diplomasi Publik RI?*

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai wawasan dalam diplomasi hubungan internasional serta kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui *interfaith dialogue*, sekaligus untuk memberikan jawaban dari hipotesa dan permasalahan yang diajukan.

Selain itu, penulisan skripsi ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan 1 (satu) pada jurusan ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Diplomasi Publik

Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations* maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people* atau bahkan *people to people relations*.

Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri. Dengan dikoordinasi oleh pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah *non-state actors* seperti NGO, media massa, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, individu (tokoh agama, wartawan, artis), dll.⁵

Banyak pihak melihat bahwa diplomasi publik adalah propaganda, *nation-branding*, atau pertukaran seni dan budaya. Namun, diplomasi publik pada hakikatnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan lebih substantif.

Istilah diplomasi publik didefinisikan oleh Berridge sebagai berikut,

*"Public diplomacy is foreign propaganda conducted or orchestrated by diplomats, and it is now a major task for diplomatic missions. This being so, it is an important function of the Ministry of Foreign Affairs to support them in this work with the supply of approved information on both foreign and domestic developments"*⁶
(Berridge, 2002: 17)

Berridge memosisikan diplomasi publik sebagai propaganda ke luar yang dilakukan oleh diplomat untuk mewakili negaranya ke luar. Oleh karena itu, menurut Berridge, departemen luar negeri (*ministry of*

⁵ Elvis Napitupulu, *Diplomasi Publik Indonesia*, <http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/diplomasi-publik-indonesia-1/>, diakses tgl. 01 Maret 2011.

⁶ Berridge, G. B. *Diplomacy: Theory and Practice*. Palgrave London, 2002

foreign affairs) memiliki kewajiban untuk mendukung upaya-upaya ini dengan pasokan informasi yang digunakan sebagai media dan bahan propaganda, baik ke luar negeri atau ke level domestik. Sedangkan mengacu pada definisi yang diberikan oleh Berridge di atas, diplomasi publik adalah bagian yang integral dengan *propaganda*. Propaganda dapat dikatakan sebagai sebuah iklan politik (*political advertising*) yang digunakan untuk mempengaruhi pemerintahan lain. Maka, tujuan dari propaganda tersebut pada dasarnya adalah,

“to persuade a foreign government to accept a particular view by winning over to this view those with influence upon it: its own general public, the media, pressure groups, and foreign allies.”⁷
(Berridge, 2002: 125)

Berkembangnya diplomasi publik setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu perkembangan aktor-aktor dalam hubungan internasional; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; serta perkembangan agenda dan cakupan dalam hubungan internasional.⁸ Sebuah kebijakan negara seringkali ditanggapi secara negatif oleh masyarakat hanya karena kesimpangsiuran atau ketidaklengkapan informasi yang beredar. Salah satu penyebabnya adalah kecepatan penyebaran penggalan informasi di era digital ini yang hanya dalam hitungan detik atau menit, demikian pula dengan proses terbangunnya sebuah opini publik yang bisa tercipta dalam hitungan detik dan menit.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hennida, Citra, *Diplomasi Publik dan Politik Luar negeri*, <http://citrahennida.blogspot.com/2008/06/diplomasi-publik-dalam-politik-luar.html>, diakses

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terhindarkan lagi bila sosialisasi dan komunikasi sebuah kebijakan negara dikatakan menjadi sangat penting. Termasuk kebijakan sebuah negara terhadap isu-isu luar negeri, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, yang berada dalam kawasan regional maupun global, serta yang berpengaruh langsung bagi masyarakat maupun tidak.

Ada dua sasaran dalam diplomasi publik yaitu kepada masyarakat internasional dan kepada masyarakat di dalam negeri. Pada intinya informasi yang disampaikan ke publik bertujuan mempromosikan kepentingan nasional yang disalurkan dalam kebijakan luar negeri terkait dengan maksud dan tujuan, latar belakang, dasar kebijakan, serta aktivitas dan implementasinya. Diplomasi publik juga mengacu pada program-program yang disponsori oleh pemerintah dengan tujuan menginformasikan atau mempengaruhi opini publik baik di dalam maupun luar negeri.

Citra positif terhadap gambaran mengenai kehidupan dinamika politik akan memberikan gambaran yang positif bagi dunia untuk meningkatkan kerja sama antarnegara. Fokus dialog bukan semata-mata hanya untuk saling memahami kebudayaan yang berbeda. Lebih mendalam ialah terciptanya sebuah kepercayaan antarnegara bahwa setiap negara memiliki potensi untuk mengembangkan kerja sama dalam semua aspek politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Diplomasi publik mampu menjembatani segala perbedaan. Inilah yang penting dalam misi

diplomasi publik mengembangkan sebuah cara berpikir, bertindak, berelasi untuk terus mengembangkan komunikasi antarnegara.

Dilaksanakannya praktek diplomasi publik yang direalisasikan dengan penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* yang bertujuan agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang Islam di suatu negara, khususnya di Indonesia, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan nasional Indonesia untuk memperbaiki citra, mempererat hubungan antar negara, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan juga dapat mengembangkan kerjasama dibidang yang lebih luas.⁹ Selain itu, diharapkan akan muncul sebuah pemahaman komprehensif mengenai berbagai isu-isu internasional sehingga publik akan dapat memahami langkah-langkah kebijakan luar negeri yang dipilih oleh pemerintah.

Ada 2 faktor dominan yang mempengaruhi Indonesia untuk melakukan diplomasi publik secara komprehensif, diantaranya:

- a. Tragedi WTC pada 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebut, banyak bermunculan perspektif negatif terhadap Islam yang pada akhirnya menyalahkan Islam atas peristiwa tersebut serta muncul berbagai pandangan yang mengidentikkan Islam dengan kekerasan. Indonesia sebagai

⁹ Benny Susetyo PR, *Peranan Diplomasi Publik*, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20%2818%20Desember%202008%29.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2010.

negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sangat berkepentingan dengan perkembangan isu stereotype negatif tersebut. Untuk mencegah terjadinya *clash of civilization* yang diakibatkan kurangnya pemahaman satu sama lain, maka perlu diselenggarakan berbagai kegiatan kerjasama lintas agama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari luar maupun dalam negeri. Pada akhirnya, publik akan mengerti bagaimana sebenarnya posisi agama dan kebudayaan dalam berbagai konflik dan teror yang sering menyalahkan agama sebagai penyebabnya.

- b. Berkembangnya pandangan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk mencapai kemajuan. Dalam konteks ini, Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia juga berpendapat hal yang sama. Namun, nilai-nilai demokrasi yang sebaiknya dipahami disini adalah nilai-nilai demokrasi yang bertumbuh dari nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat negara itu sendiri (*home-grown democracy*) bukan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan oleh negara lain. Diplomasi publik dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya lebih mengerti mengenai demokrasi. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai fasilitas untuk membagi pengalaman kepada negara-negara sahabat

mengenai praktek berdemokrasi. Tujuan ideal yang hendak dicapai pada nantinya adalah lahirnya kemitraan antara negara/pemerintah dan *non-state actors* yang berkepentingan.¹⁰

Dalam beberapa pergelaran *Interfaith Dialogue* selain dihadiri oleh organisasi-organisasi non pemerintah, juga dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, dalam hal ini adalah ikut sertanya perwakilan dari beberapa universitas di Indonesia seperti, Muhammad Ali (UIN Syarif Hidayatullah) dan Thamrin Amal Tomagola (FISIF-UI). Keterlibatan publik dalam *Interfaith Dialogue* ini mendapat peranan yang sangat penting dimana publik, dalam hal ini publik nasional dan internasional, adalah merupakan salah satu sasaran yang sangat menentukan dalam menyukseskan program dan tujuan dari penyelenggaraan *Interfaith Dialogue*. Dimana dengan melibatkan publik, maksud dan tujuan dari penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* ini akan lebih mudah. Karena sebagai mana kita ketahui bahwa opini publik sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan suatu pemerintah, dalam hal ini kepercayaan publik terhadap situasi dan kondisi di suatu negara, sehingga dengan pemahaman tersebut opini publik akan sangat membantu dalam menyukseskan dan bahkan memperbaiki hubungan antar negara yang berkepentingan.

¹⁰ Elvis Napitupulu, *Diplomasi Publik Indonesia*,
<http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/diplomasi-publik-indonesia-1/>, diakses tanggal 01

2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest Concept*)

Kepentingan nasional bukanlah kepentingan dari kelompok, kelas, elite yang berkuasa, atau kepentingan asing yang diperjuangkan oleh kelompok dalam negeri melainkan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan, bukan suatu ide atau gagasan yang dicapai secara abstrak dan ilmiah tetapi merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung secara terus-menerus. Pemerintahlah, melalui berbagai lembaganya, yang pada akhirnya paling bertanggungjawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

Menurut K.J Holsti kepentingan nasional diartikan sebagai berikut :

Kepentingan Nasional (*national interest*) dalam definisi ini dapat diartikan sebagai rangkaian gagasan dari tujuan dan kebutuhan yang diterapkan oleh pembuat keputusan yang harus dijalankan kedalam tindakan nyata oleh bangsa demi kepentingan negara (bangsa) yang bersangkutan.¹¹

Kepentingan nasional dalam arti sempit dapat diartikan sebagai:

"kesejahteraan umum, hak perlindungan hukum, dan kepentingan mempertahankan kelangsungan hidupnya yang berarti mempertahankan politik dan identitas kulturalnya".

Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara/bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara/bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara/bangsa harus bisa

¹¹ K. J. Holsti, *Politik Internasional*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hlm 7

mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi – politiknya (yaitu identitas politiknya), serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya). Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerja sama maupun konflik.¹²

Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional.

Seperti kita ketahui ada dua pokok kekuatan nasional yaitu tangible dan intangible. Politik suatu negara tidak lepas dari suatu kepentingan nasional, karena tujuan politik adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Berdasar uraian di atas maka arah tujuan perumusan politik luar negeri Indonesia mengarah pada unsur mempertahankan kelangsungan hidup bangsa yaitu dengan melakukan jalan diplomasi untuk memperbaiki citra Indonesia supaya lebih baik lagi di mata dunia internasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

a. Memperbaiki Citra Indonesia

Setiap negara di dunia pasti menginginkan adanya citra baik dari Negara lain, tak terkecuali Indonesia. Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* merupakan salah satu bentuk upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan citra Indonesia bahwa Indonesia bukanlah negara sarang teroris dan untuk menunjukkan kepada dunia internasional Indonesia adalah negara yang aman, sekaligus upaya Indonesia untuk memperkenalkan

¹² Mas'ood Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional* LP3ES, Jakarta 1994, hlm 141

keanekaragaman budaya Indonesia.

Berbagai peristiwa yang terjadi dalam skala nasional maupun global, seperti Bom Bali I dan II yang merusak pariwisata Bali dan sangat berdampak bagi pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia, Tragedi Bom JW Marriott dan aksi pemboman di beberapa Kedutaan Besar Asing di Jakarta, Tragedi WTC 11 September di Amerika Serikat, berikut isu terorisme dan “konflik” Islam-NonIslam yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sarang teroris. Secara tidak langsung serangkaian peristiwa tersebut diatas sudah menjadi penyebab menurunnya citra Indonesia dimata dunia internasional, khususnya dalam hal keamanan nasional. Hal ini tentu saja dapat berdampak buruk bagi sistem politik nasional.

Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* ini otomatis akan mendapat perhatian dan pers internasional yang kemudian memungkinkan untuk dipergunakan sebagai alat memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional bahwa Indonesia bukan sarang terorisme dan aman untuk dikunjungi. Dan yang paling penting adalah, konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara di dunia internasional terhadap negara Indonesia, dimana konferensi tersebut menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan wajah Islam Indonesia , memberi pemahaman tentang dunia Islam, dan pada akhirnya tentang negara Indonesia itu

sendiri Dengan diselenggarakannya *Interfaith Dialogue* ini

diharapkan bisa lebih menjalin hubungan yang baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia merupakan negara dikawasan Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti minyak bumi dan gas alam. Selain itu memiliki pemandangan alam yang indah serta keanekaragaman kebudayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan devisa pemerintah Indonesia disamping minyak dan gas. Pasca ledakan bom Bali serta munculnya *travel warning* ke Indonesia, pariwisata Indonesia mengalami guncangan. Akibatnya pemerintah kurang mendapatkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata. Bahkan direktorat pajak pun berpendapat pasca Bom Bali, yang menyatakan bahwa pemerintah kehilangan pajak sekitar Rp. 10,8 triliun karena menurunnya jumlah penumpang pesawat, berkurangnya tamu hotel dan restoran.

Selain itu, dampak Bom Bali sangat dirasakan oleh masyarakat Bali khususnya, juga masyarakat Indonesia umumnya. Pariwisata merupakan sektor unggulan dan sekaligus tulang punggung dalam mendatangkan pendapatan setelah pertanian dan

industri kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang bekerja dalam bidang pariwisata mulai manajer hotel, karyawan sampai tukang pijit wisatawan. Sedangkan dampak tidak langsung dialami oleh masyarakat yang menyediakan produk dan jasa pendukung pariwisata, seperti produk kerajinan maupun jasa transportasi.

Oleh karena itu dengan *Interfaith Dialogue*, diharapkan mampu memperbaiki perekonomian Indonesia yang sempat menurun akibat Bom Bali dan bom-bom lainnya. Yaitu dengan memperkenalkan Indonesia dan juga Islam di Indonesia yang sedang mendapat sorotan dunia internasional dikarenakan isu terorisme dalam dialog antar agama yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara tersebut. Langkah ini diharapkan dapat disambut positif dan berdampak baik pula bagi perbaikan citra Indonesia terlebih masalah keamanan di Indonesia, sehingga dapat menarik kembali minat wisatawan dan juga investor untuk datang ke Indonesia, maka tidak hanya negara saja yang menikmati keuntungan melainkan juga pelaku bisnis. Masyarakat Indonesia, dapat memanfaatkan kunjungan wisatawan ini untuk menjadikan lahan bisnis, melalui penjualan souvenir, handycraft, dan penjualan jasa melalui bisnis penginapan, kesenian, dan transportasi, dan sebagainya.

E. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotesa sebagai berikut:

Kepentingan Indonesia memilih *Interfaith Dialogue* adalah dapat dimanfaatkan sebagai sarana/alat diplomasi publik untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yaitu, untuk memperbaiki citra dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok, bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan "how" dan "why", bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu suatu kelompok suatu organisasi

(komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial¹³. Sedangkan desain studi kasusnya menggunakan desain studi kasus tunggal dimana kasus tersebut menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik¹⁴.

Dalam penelitian ini penulis akan menguji konsep kepentingan nasional (*national interest concept*), dan teori diplomasi publik yang berkaitan dengan memperbaiki dan menaikkan citra bagi Indonesia khususnya melalui *bilateral interfaith dialogue*. Penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, hanya menggambarkan hasil atau kondisi obyek yang telah diteliti.

2. Teknik Pengambilan Data

Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka, melalui penerapan kualitatif yang berisikan kutipan data-data yang memberikan gambaran tentang penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan teknik studi literatur dan dokumentasi yaitu dengan menggunakan media buku, artikel dan data-data dari internet, serta media lain yang dalam bentuk cetak untuk menguatkan data serta memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

¹³ Mulyana, Deddy., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 201.

¹⁴ Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 192.

3. Teknik Analisa Data

Kajian ini merupakan kajian deskriptif-eksploratif, yang bertujuan menggambarkan dan mengidentifikasi diplomasi Indonesia dalam hubungan luar negerinya. Fokusnya mengarah pada proses dan pengimplementasian diplomasi publik pemerintah Indonesia, dalam memperbaiki dan menaikkan citra bagi Indonesia khususnya melalui *interfaith dialogue* untuk mencapai kepentingan nasional.

Tahap awal pelaksanaan kajian ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran tentang diplomasi publik melalui *interfaith dialogue*. Selain itu proses dan penerapan diplomasi publik dalam pencapaian kepentingan nasional, yang sekaligus sebagai landasan untuk dijadikan pertimbangan dalam rumusan selanjutnya.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-eksplanatif, untuk menemukan kebijakan Indonesia yang dapat diaktualkan dalam implementasi diplomasi publik melalui *interfaith dialogue*. Dari hasil analisis ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat jangkauan penelitian yang hanya dibatasi mengenai *interfaith dialogue* yang diselenggarakan oleh Direktorat Diplomasi Publik RI pada tahun 2004-2006 sebagai wujud konkret diplomasi publik Indonesia.

H. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian mengenai kebijakan Indonesia dalam merespon kejadian atau fenomena internasional terutama yang erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan atau menentukan kebijakan-kebijakannya, serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan, program pemerintah (serta alasannya), sehingga masyarakat dapat mendukung dan ikut serta dalam menyukseskan kebijakan pemerintah Indonesia guna tercapainya

I. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memperoleh uraian atau gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan uraian yang sistematis yakni penulis menyajikan per bab. Di dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab.

Bab I, Berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu; teori diplomasi publik dan konsep kepentingan nasional (*national interest concept*).

Bab II, Berisikan tentang Wajah Indonesia Pasca Terorisme.

Bab III, Berisikan tentang *Intrafaith Dialogue* dalam Diplomasi Publik RI 2004-2006.

Kemudian pada bab IV, Berisi tentang *Interfaith Dialogue* sebagai sarana untuk membangun citra dan meningkatkan perekonomian Indonesia.